

# PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR

**Ikhsan Ridho Nugroho**  
*iridhonugroho@gmail.com*  
Kurnia

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA) SURABAYA**

## ABSTRACT

*This research aimed to examine and analyze the effect of regional taxation and regional retribution on the Local-Owned Source Revenue of regency/city of East Java Province 2013-2017. The population was some regency/city of East Java Province. While, the data were secondary. In line with, it was the realization of budget report in the form of local taxes dan levies as well as Local-Owned Source Revenue of regency/city of East Java Province. Moreover, the data collection technique used time series of 2013-2017 with 190 observational data. Furthermore, the data analysis technique used hypothesis test dan multiple linear regression with SPSS (Statistical Product and Service Solutions). The research result concluded local tax had positive effect on the Local-Owned Source Revenue. Likewise, regional retribution had positive effect on the Local-Owned Source Revenue. In addition, from the test of determination, it concluded local tax and regional levies contributed to the PAD of 98.3%. Meanwhile, the remaining of 1.7% was obtained from other factors which were not examined. In brief, regional taxes and levies were the main contributors on the Local-Owned Source Revenue.*

*Keywords: regional tax, regional retribution, local-owned source revenue*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/ Kota pada Provinsi Jawa Timur periode 2013-2017. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pendapatan yang berupa pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan ialah data sekunder yang menggunakan runtun waktu (*time series*) untuk periode tahun 2013-2017, yang berjumlah 190 data pengamatan. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda, menggunakan alat bantu SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*). Hasil analisis penelitian yang diperoleh menunjukkan pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah dan retribusi daerah juga menunjukkan pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Sementara dalam uji determinasi dikatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berkontribusi terhadap PAD sebesar 98,3%. Sisanya sebesar 1,7% didapatkan dari faktor lain yang tidak diteliti. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah adalah penyumbang utama pada PAD.

Kata Kunci: pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah

## PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai aturan perundang-undangan. Penerapan desentralisasi sebagai wujud dari otonomi daerah juga menimbulkan permasalahan dalam pembagian keuangan antara pusat dan daerah dimana pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing tingkat pemerintahan memerlukan dukungan pendanaan. Pemerintah daerah dalam hal ini dituntut memiliki kemandirian secara fiskal karena subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat yang

selama ini sebagai sumber utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mulai kurang kontribusinya dan menjadi sumber utamanya adalah pendapatan dari daerah sendiri (Lakoy *et al*, 2016). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintahan daerah tersebut terhadap pemerintahan pusat. Sebaliknya, maka rendah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintahan daerah tersebut terhadap pemerintahan pusat, hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri. Hal yang bisa diukur adalah Semakin besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintahan daerah tersebut terhadap pemerintahan pusat.

Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) beberapa pos harus ditingkatkan antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah berasal dari empat sumber, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Lakoy *et al*, 2016). Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai kondisi masing-masing daerah dan setiap daerah diberi wewenang yang lebih luas untuk menggali, mengelola dan menggunakan sumber-sumber daya alam serta potensi-potensi lain yang terdapat di daerahnya masing-masing sehingga dapat meningkatkan PAD, mengingat pentingnya pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber PAD maka Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Timur harus berusaha mencapai target penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dan meningkatkan efisiensi pemungutan pajak daerahnya untuk meningkatkan PAD yang digunakan untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Dengan demikian, penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap PAD.

Menurut Halim (2013) peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah. Hal ini selaras dengan pendapat Mahmudi (2015) yang mengatakan bahwa peningkatan kemandirian daerah akan berdampak pada peningkatan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di mana kemandirian daerah ini merujuk pada kemampuan daerah otonom untuk mengelola dan menggali sumber keuangan daerah itu sendiri. Sehingga PAD dapat dikatakan sebagai tulang punggung pembiayaan daerah, di mana kemampuan suatu daerah dalam menggali PAD akan menentukan jalannya perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah dapat diperoleh dari penerimaan komponen-komponen PAD itu sendiri yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Rendahnya PAD mengindikasikan bahwa daerah tersebut masih memiliki tingkat kemandirian yang rendah dan memiliki ketergantungan terhadap pemerintah pusat yang masih tinggi dalam hal pembiayaan pembangunan baik langsung maupun tidak langsung. Menurut Kusuma (2011) kriteria yang biasanya digunakan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri adalah dengan peningkatan PAD berupa pajak dan retribusi daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk pemerataan pembangunan daerah, meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari beberapa komponen yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji pengaruh penerimaan pajak daerah dan penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Asteria (2015) yang menunjukkan hasil bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini konsisten terhadap penelitian yang dilakukan oleh Gita (2008) yang menyatakan bahwa kontribusi PAD terhadap belanja daerah setelah otonomi daerah lebih rendah jika dibandingkan dengan sebelum otonomi daerah. Hasil serupa dibuktikan oleh Wenny (2013) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan komponen berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dan lain-lain PAD yang sah secara parsial berpengaruh dominan terhadap kinerja keuangan. Namun pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Kusuma dan Wirawati (2013) yang membuktikan bahwa penerimaan pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan PAD, begitu pula dengan penerimaan retribusi daerah yang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD. Namun, dalam penelitian ini dikatakan bahwa penerimaan pajak daerah lebih berkontribusi terhadap PAD jika dibandingkan dengan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Asteria (2015) yang meneliti tentang pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan di daerah otonom. Pada tahun 2012-2016, pertumbuhan PAD di Provinsi Jawa Tengah meningkat secara lambat, hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan variabel yang sama dengan penelitian Asteria (2015). Replikasi penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah hasil yang diperoleh penelitian sebelumnya akan sama dengan penelitian yang dilakukan saat ini dengan menggunakan sampel yang berbeda, tahun penelitian yang berbeda dan kondisi keuangan daerah yang berbeda pula. Dalam penelitiannya, Asteria (2015) melakukan penelitian di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah populasi 33 Kabupaten/Kota, dengan periode penelitian selama 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2008 hingga tahun 2012. Sedangkan pada penelitian ini, penulis menggunakan populasi sebanyak 38 Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Timur, dengan periode penelitian selama 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Penelitian ini menggunakan 2 macam variabel, yaitu variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependent variable*). Variabel bebas yang digunakan adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan latar belakang masalah dan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dikemukakan di atas, maka penulis akan meneliti hubungan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan judul; "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013-2017". Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2013-2017.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diuji dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur ? 2) Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur ?

## **TINJAUAN TEORITIS**

### **Tinjauan Teoritis**

Pengertian pajak dari sudut pandang Negara merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, baik

pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih (Suandy, 2008:1). Menurut Supramono dan Damayanti (2010) pajak didefinisikan sebagai iuran tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum. Pajak didefinisikan sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada Negara disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

### **Pajak daerah**

Menurut Darwin (2010:68) Pajak daerah yaitu Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011). Pajak daerah adalah yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Dasar hukum pengenaan pajak daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Menurut undang-undang tersebut pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **Retribusi Daerah**

Dalam Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dijelaskan yang dimaksud dengan retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Menurut Boediono dalam bukunya Perpajakan Indonesia (2001: 14) memberikan pengertian bahwa retribusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh mereka yang menikmati jasa negara secara langsung. Menurut Juli Panglima Saragih (2002: 65) Retribusi Daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Devas (1989: 95) memberi pengertian Retribusi Daerah sebagai kebijaksanaan memungut bayaran untuk barang dan layanan yang disediakan pemerintah.

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara (Siahaan, 2004). Dalam pelaksanaan pungutan Retribusi Daerah tidak semua jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, namun hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan sebagai objek retribusi jasa tertentu tersebut dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

### **Pendapatan Asli Daerah**

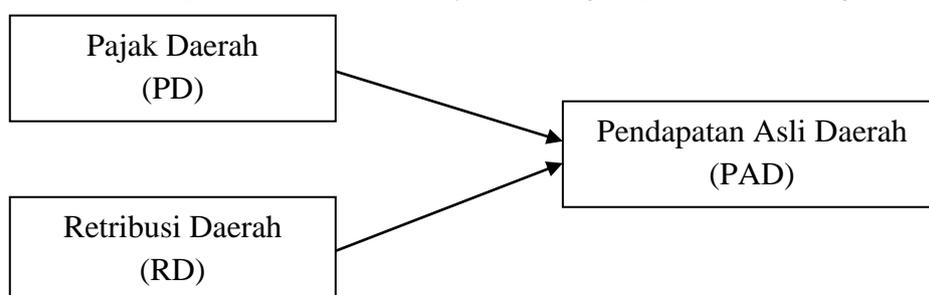
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 butir 15 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang di maksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Nurcholis (2007:182), pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah.

Pasal 1 butir 17 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menentukan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang di peroleh daerah yang di pungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah dapat di peroleh melalui sumber-sumber dana yang di dapat dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi (Penjelasan UU No. 33 Tahun 2004).

### Rerangka Konseptual

Berdasarkan uraian sebelumnya dan telaah pustaka, maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi rerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1  
Rerangka Konseptual

### Pengembangan Hipotesis

#### Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan dengan membuat kebijakan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pengalokasian belanja modal seperti pembangunan infrastruktur daerah, meningkatkan fasilitas dan pelayanan publik, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat daerah setempat. Salah satu faktor yang digunakan untuk meningkatkan belanja modal dari segi keuangan (*financial factors*) yaitu melalui pendapatan (*revenue*). Pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik mempunyai sumber-sumber pendapatan daerah baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun yang berasal dari daerah itu sendiri. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Selain itu pajak daerah merupakan bentuk peran

serta masyarakat dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Pajak daerah juga merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, dimana setiap peningkatan pajak daerah akan mempengaruhi peningkatan pada pendapatan asli daerah.

Dengan demikian, adanya hubungan antara pajak daerah dengan pendapatan asli daerah yaitu jika jumlah penerimaan pajak daerah mengalami kenaikan maka pendapatan asli daerah juga mengalami kenaikan. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. Hartono (2017) berpendapat bahwa salah satu sumber pendapatan asli daerah ialah pajak daerah. Lebih lanjut, Hartono (2017) menjelaskan bahwa pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan semakin besar jumlah penerimaan Pajak Daerah maka akan semakin besar jumlah Pendapatan Asli Daerah. Karena Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, setiap peningkatan Pajak Daerah akan mempengaruhi peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah (Putri dan Rahayu, 2015). Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penelitian Putri dan Rahayu (2015) dan Asteria (2015), menunjukkan bahwa secara parsial Pajak Daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dari penjelasan diatas, maka hipotesis pertama dapat diduga sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

### **Pengaruh Retribusi daerah terhadap Pendapatan asli daerah**

Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan publik serta memajukan perekonomian daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan publik dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja modal. Salah satu faktor yang mempengaruhi belanja modal dari segi keuangan (*financial factors*) yaitu melalui pendapatan (*revenue*). Pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik mempunyai sumber-sumber pendapatan daerah baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun yang berasal dari daerah itu sendiri. Kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu melalui penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Retribusi daerah sebagaimana halnya dengan Pajak Daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah, menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Usman (2017) menerangkan bahwa retribusi daerah mempunyai peranan dan kontribusi paling besar terhadap PAD, dimana pengelolaannya diserahkan kepada daerah itu sendiri dan dalam menyelenggarakan pembangunan di daerahnya, faktor sumber pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sangat menentukan terlaksananya pembangunan itu sendiri. Penelitian Putri dan Rahayu (2015) menunjukkan bahwa secara parsial retribusi daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, karena retribusi daerah merupakan salah satu komponen PAD yang mempunyai peranan cukup besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah untuk merealisasi pendapatan asli daerah. Dengan demikian, adanya hubungan antara retribusi daerah dengan

pendapatan asli daerah yaitu jika jumlah penerimaan retribusi daerah mengalami kenaikan maka pendapatan asli daerah juga mengalami kenaikan. Sedangkan penelitian Lakoy *et al* (2016) membuktikan bahwa adanya pengaruh positif yang tidak signifikan dari retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari penjelasan diatas, maka hipotesis kedua diduga sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan asli daerah

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dan merupakan penelitian yang tergolong metode kausal komparatif yang merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif dengan karakteristik masalah yang berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2014:35). Pendekatan yang digunakan adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode yang menggunakan sejumlah sampel dan data-data numerikal atau berupa angka (Sugiyono, 2014:37). Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:80). Populasi dalam penelitian ini adalah Data Laporan Realisasi PAD pada seluruh pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur selama lima tahun, yaitu dari tahun 2013-2017.

### Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel adalah cara peneliti mengambil sampel atau contoh yang representatif dari populasi yang tersedia (Sanusi, 2014: 88). Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pengambilan secara acak sesuai tujuan atau target dengan pertimbangan kriteria tertentu. Berdasarkan metode tersebut, maka kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Kabupaten/Kota yang terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Timur periode 2013 - 2017. 2) Kabupaten/Kota yang secara berturut-turut menyampaikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 2013 - 2017 ke Badan Pemeriksa Keuangan.

### Teknik Pengumpulan Data

#### Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada, misalnya buku dan majalah, publikasi pemerintah mengenai indikator laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 2013 - 2017.

#### Sumber Data

Data yang diteliti merupakan data *time series* berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan yang berupa pajak daerah, retribusi daerah dan realisasi pendapatan asli daerah seluruh pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur periode 2013-2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa instansi terkait yakni Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Semua data tersebut diperoleh dari publikasi resmi instansi tersebut baik melalui situs masing-masing, yaitu [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) dan [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id).

### Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, karena yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, peneliti menggunakan data yang dipublikasi oleh masing-masing instansi terkait seperti telah disebutkan sebelumnya, yaitu: Badan Pusat Statistik dan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan pada Provinsi Jawa Timur dengan periode 2013-2017.

## **Variabel dan Definisi Operasional Variabel**

### **Variabel Penelitian**

Menurut Sugiyono (2014: 133) variabel merupakan segala sesuatu sifat atau nilai dari obyek yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, menggunakan dua macam variabel, yaitu: 1) Variabel bebas (*Independen*) yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (*dependen*). Variabel *independen* dalam penelitian yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. 2) Variabel terikat (*Dependen*) yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (*independen*). Variabel *dependen* dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah.

### **Definisi Operasional Variabel**

#### **Variabel dependen**

Merupakan variabel yang dipengaruhi adanya variabel independen / bebas. Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, "Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Adapun sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: (1) pajak daerah, (2) retribusi daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah".

#### **Variabel Independen**

Menurut Sugiyono (2014:39), variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini variabel independen meliputi pajak daerah, dan retribusi daerah yang dapat diuraikan sebagai berikut: a) Pajak Daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, "Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". b) Retribusi Daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, "Retribusi daerah adalah pengutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan".

### **Teknik Analisa Data**

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting karena melalui analisis data dapat memberikan arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian (Nazir, 2013:304). Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal (Sugiyono, 2014: 143). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi berganda dilakukan untuk menguji pengaruh dari beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat (Sekaran, 2009:299). Metode analisis perhitungan menggunakan alat bantu berupa perangkat lunak statistik yang dikenal dengan SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) yang bertujuan untuk menentukan pengaruh pajak daerah, dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

### Statistik Deskriptif

Penyajian Statistik deskriptif bertujuan agar dapat dilihat profil dari data penelitian tersebut dengan hubungan yang ada antar variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah pajak daerah, dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2013: 154) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel dependen mempunyai pola distribusi normal atau tidak. Untuk menguji normalitas ada dua cara yang digunakan yaitu analisis grafik dan uji statistik. Uji statistik yang digunakan pada penelitian ini menggunakan rumus *Kolmogorov-Smirnov* yang mempunyai kriteria sebagai berikut:

$H_0$ : Data terdistribusi secara normal

$H_a$ : data tidak terdistribusi secara normal

Data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai probabilitas atau nilai signifikansinya  $\geq 0,05$  namun apabila data yang dihasilkan nilai probabilitasnya atau nilai signifikansinya  $< 0,05$  maka data tidak berdistribusi normal.

#### Uji Multikolinieritas

Pada penelitian ini menggunakan uji multikolinieritas yang bertujuan untuk mengetahui model regresi ditemukan adanya korelasi dengan variabel independen (Ghozali, 2013: 156). Jika tidak ada korelasi, maka model regresi tersebut dikatakan baik. Uji multikolinieritas pada penelitian ini dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) yaitu sebagai berikut: a) Jika nilai *tolerance*  $> 0,1$  dan nilai VIF  $< 10$  maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi. b) Jika nilai *tolerance*  $< 0,1$  dan nilai VIF  $> 10$  maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

#### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi berganda linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Jika ada masalah autokorelasi, maka model regresi yang seharusnya signifikan, menjadi tidak layak untuk dipakai (Santoso, 2013: 132). Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *Durbin Watson*. Bila angka D-W diantara  $-2$  sampai  $+2$ , berarti tidak terjadi autokorelasi. Hal ini dapat diidentifikasi ada atau tidak gejala autokorelasi data dengan angka *Durbin Watson* (Santoso, 2013: 135)

#### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain maka disebut homoskedastisitas dan jika *variance* berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada berbetuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka telah terjadi homoskedastisitas (Ghozali, 2013: 105).

### Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik regresi linier berganda yang merupakan alat ukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, dan juga menunjukkan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2013: 131). Penelitian ini terdiri dari 2 variabel independen (pajak daerah dan retribusi daerah) dan satu variabel dependen (pendapatan asli daerah), sehingga menggunakan persamaan regresi berganda. Persamaan regresi yang digunakan adalah:

$$PAD = \alpha + \beta_1 PD + \beta_2 RD + \varepsilon_i$$

Keterangan:

PAD	: Pendapatan Asli Daerah
$\alpha$	: Konstanta
$\beta_{1,2}$	: Koefisien variabel bebas
PD	: Pajak Daerah
RD	: Retribusi Daerah
$\varepsilon$	: <i>error</i>

### Uji Kelayakan Model

#### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Analisis ini pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi dilihat pada *adjusted Rsquare*. *Adjusted Rsquare* merupakan *Rsquare* yang telah disesuaikan dan biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan menjelaskan pengaruh jika dalam regresi menggunakan lebih dari dua variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2013: 137). Dalam penelitian ini, mengukur pengaruh variabel bebas: Pajak Daerah (PD) dan Retribusi Daerah (RD) terhadap variabel terikat: Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar nilai  $R^2$ , maka semakin kuat kemampuan model regresi yang diperoleh untuk menerangkan kondisi yang sebenarnya.

### Uji F

Pada pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan apakah variabel independen pada model mempunyai pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen dan bertujuan untuk mengetahui apakah data tersebut layak atau tidak layak. Berikut kriteria pengujian: a) Jika nilai sig < 0,05, maka hipotesis diterima yang menunjukkan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dan model regresi layak. b) Jika nilai sig  $\geq$  0,05, maka hipotesis ditolak yang menunjukkan variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dan model regresinya tidak layak.

### Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji *t-test*. Menurut (Ghozali, 2013: 143) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari  $\alpha$  (asumsi tarif nyata 0,05) maka dapat dikatakan adanya hubungan yang kuat atau positif antara variabel independen dengan variabel dependen. Berikut adalah kriteria pengujian ini:

- Jika nilai sig < 0,05, maka hipotesis diterima yang menunjukkan variabel independen berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen.
- Jika nilai sig  $\geq$  0,05, maka hipotesis ditolak yang menunjukkan variabel independen tidak berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Bagian ini akan mengemukakan mengenai gambaran objek penelitian, statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji kelayakan model, dan pengujian hipotesis.

### Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2014: 29) analisis deskriptif atau statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud memuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Analisis deskriptif variabel digunakan untuk menggambarkan distribusi data diantaranya rata-rata (*mean*), nilai minimum, nilai maksimum dan standar deviasi dari data yang diteliti. Rata-rata (*mean*) digunakan untuk mengetahui rata-rata data yang diteliti, nilai minimum untuk mengetahui jumlah paling kecil dari data yang diteliti, nilai maksimum untuk mengetahui jumlah yang paling besar dari data yang diteliti, dan standar deviasi untuk mengetahui seberapa besar data yang diteliti tersebut bervariasi dari rata-rata. Pada analisis deskriptif akan disajikan gambaran masing-masing variabel penelitian yaitu pajak daerah dan retribusi daerah sebagai variabel independen dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel dependen. Dari hasil pengumpulan data sekunder mengenai pajak daerah, retribusi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2017, maka hasil SPSS tentang statistik deskriptif disajikan sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Hasil Statistik Deskriptif**  
**Descriptive Statistics**

Model	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	190	59544940728	5161844571172	376277486118,37	633433349485,411
Pajak Daerah	190	8428671412	3595670492734	172110574384,85	458605095652,092
Retribusi Daerah	190	4480985852	557966574670	37473398553,61	65191070358,033
Valid N (listwise)	190				

Keterangan: Dalam Ribuan Rupiah

Sumber: LKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017

Berdasarkan hasil statistik deskriptif dapat dilihat bahwa pengolahan data menghasilkan nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi atas variabel-variabel yang digunakan. Tabel 1 menunjukkan bahwa dalam penelitian ini ada 60 data observasi yang digunakan, dengan rincian variabel dependen dan independen sebagai berikut:

### Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil penelitian yang disajikan pada tabel 1 statistik deskriptif di atas terlihat bahwa terdapat 190 data observasi yang digunakan dalam penelitian, dimana Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai minimum sebesar Rp59.544.940.728. Dari data tersebut diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah terendah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dimiliki oleh Kota Batu pada tahun 2013. Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai maksimum sebesar Rp5.161.844.571.172. Dari data tersebut diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah tertinggi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dimiliki Kota Surabaya pada tahun 2017, selain itu nilai rata-rata (*mean*) dari Pendapatan Asli Daerah selama 5 tahun adalah sebesar Rp376.277,486,118 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp633.433,349,485.

## Pajak Daerah

Hasil penelitian yang disajikan pada tabel 1 statistik deskriptif di atas terlihat bahwa terdapat 190 data observasi yang digunakan dalam penelitian, dimana pajak daerah memiliki nilai minimum sebesar Rp8.428.671.412. Dari data tersebut diketahui bahwa pajak daerah terendah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dimiliki oleh Kabupaten Sampang pada tahun 2013. Pajak daerah memiliki nilai maksimum sebesar Rp3.595.670.492.734. Dari data tersebut diketahui bahwa pajak daerah tertinggi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dimiliki Kota Surabaya pada tahun 2017, selain itu nilai rata-rata (*mean*) dari pajak daerah selama 5 tahun adalah sebesar Rp172.110.574.385 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp458.605.095.652.

## Retribusi Daerah

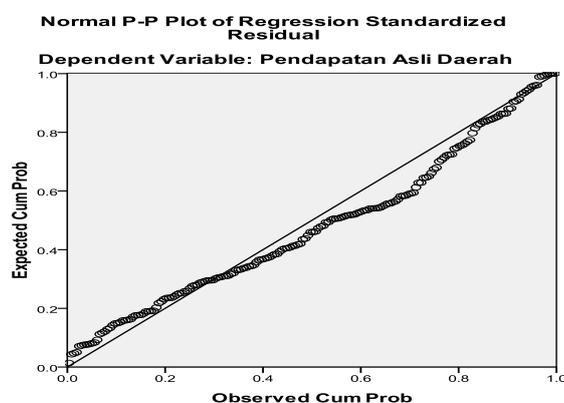
Hasil penelitian yang disajikan pada tabel 1 statistik deskriptif di atas terlihat bahwa terdapat 190 data observasi yang digunakan dalam penelitian, dimana retribusi daerah memiliki nilai minimum sebesar Rp4.480.985.852. Dari data tersebut diketahui bahwa retribusi daerah terendah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dimiliki oleh Kota Batu pada tahun 2014. Sedangkan retribusi daerah dengan nilai maksimum diperoleh sebesar Rp557.966.574.670 pada Kota Surabaya. Dari data tersebut diketahui bahwa retribusi daerah tertinggi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dimiliki Kota Surabaya pada tahun 2017, selain itu nilai rata-rata (*mean*) dari retribusi daerah selama 5 tahun adalah sebesar Rp37.473,398,554 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp65.191,070,358.

## Hasil Uji Asumsi Klasik

Untuk melihat apakah asumsi-asumsi yang diperlukan dalam analisis regresi linier terpenuhi dilakukan uji asumsi klasik. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. Data penelitian ini diolah menggunakan aplikasi *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) versi 21.0. Dari data yang telah diolah, hasil uji asumsi klasik dapat dirinci sebagai berikut:

## Uji Normalitas Data

Uji normalitas merupakan suatu alat uji yang digunakan untuk menguji apakah dari variabel-variabel yang digunakan dalam model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik *Normal Probability Plot*. Berikut ini merupakan hasil uji Normalitas data dengan analisis grafik *Normal Probability Plot*:



Gambar 2  
Hasil Uji Normalitas dengan Grafik *Normal Probability Plot*  
Sumber: Data Sekunder Diolah (2019)

Dari grafik *Normal Probability Plot* di atas, dapat dilihat bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, yang berarti menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Untuk lebih meyakinkan hasil uji normalitas, maka dapat digunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Jika hasil menunjukkan angka nilai signifikansi jauh di atas 0,05 berarti nilai residual terdistribusi secara normal atau memenuhi asumsi klasik. Berikut ini merupakan hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S):

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov (K-S)**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		190
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000037
	Std. Deviation	83.18057911
Most Extreme Differences	Absolute	.116
	Positive	.116
	Negative	-.053
Kolmogorov-Smirnov Z		1.597
Asymp. Sig. (2-tailed)		.090

Sumber: Data Sekunder Diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 2 di atas, hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 0,05 yaitu 0,090 > 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa data ini terdistribusi secara normal.

### Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi di antara variabel bebas (*independent variable*). Tidak terjadinya korelasi antara variabel independen menunjukkan regresi yang baik. Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan nilai *Variance Influence Factor* (VIF). Dasar pengambilan keputusannya yaitu jika nilai *Tolerance* > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Sedangkan jika nilai *Tolerance* < 0,10 dan VIF > 10, maka dapat diartikan bahwa terjadi multikolinearitas. Berikut ini hasil dari uji Multikolinearitas:

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Pajak Daerah	,897	2.731
Retribusi Daerah	,897	2.731

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Data Sekunder Diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa besarnya nilai *tolerance* pada seluruh variabel independen pajak daerah dan retribusidaerah adalah sebesar 0,897 dengan nilai VIF sebesar 2,731. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen pajak daerah dan retribusidaerah tidak ada yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10 dan juga tidak ada yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

### Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1

(sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada *problem* autokorelasi. Regresi yang baik adalah regresi yang tidak terjadi autokorelasi di dalamnya. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala autokorelasi dapat dilihat dari tabel *Durbin Watson* (D-W), apabila angka D-W berada di antara -2 sampai +2 berarti tidak terjadi autokorelasi. Hasil uji *Durbin Watson* (D-W). Adapun model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari gejala autokorelasi. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 4 dibawah ini:

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Model	Durbin-Watson
1	1.282

a. Predictors: (Constant), Retribusi daerah, Pajak daerah,

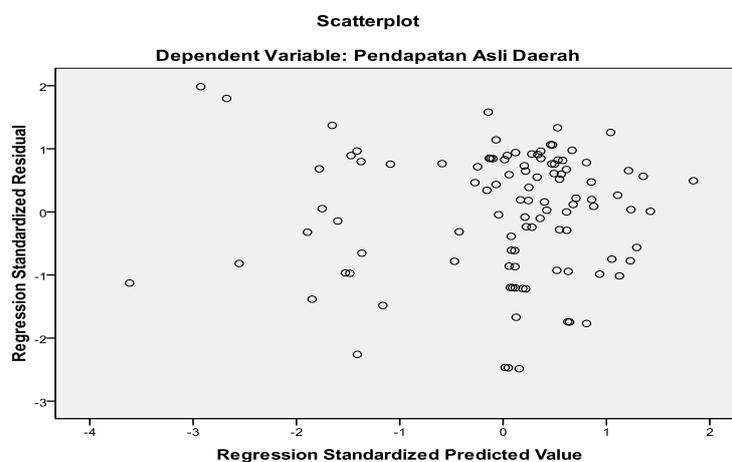
b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Data Sekunder Diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 4 di atas, hasil uji autokorelasi dengan *Durbin Watson* (D-W) dapat diketahui bahwa nilai D-W sebesar 1,282 yang berarti angka D-W terletak di antara -2 sampai +2 ( $-2 < 1,655 < 2$ ). Dengan demikian model regresi yang akan digunakan tidak terdapat masalah autokorelasi. Selain itu model regresi yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengestimasi nilai variabel pendapatan asli daerah pada nilai variabel pajak daerah dan retribusi daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terdapat gejala autokorelasi.

### Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013: 134). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatterplot*. Dasar pengambilan keputusan dengan analisis grafik Uji *Scatterplot* adalah: a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan terdapat heteroskedastisitas. b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terdapat heteroskedastisitas. Grafik pengujian Heteroskedastisitas disajikan pada Gambar 3:



**Gambar 3**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**  
Sumber: Data Sekunder Diolah (2019)

Berdasarkan grafik *Scatterplot* di atas terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), serta tersebar di atas maupun di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi yang digunakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

### Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan alat untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen (Ghozali, 2013: 96). Tujuannya adalah untuk mengestimasi data atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Hasil analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	11.999	7.797	
Pajak Daerah	1.168	.043	.846
Retribusi Daerah	1.473	.306	.152

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Data Sekunder Diolah (2019)

Berdasarkan hasil regresi di atas, maka dapat diketahui persamaan regresi sebagai berikut:

$$PAD = 11.999 + 1,168PD + 1,473RD + \varepsilon$$

### Hasil Uji Kelayakan Model

#### Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) akan mengukur sejauh mana tingkat keterikatan atau kontribusi variabel independen yaitu pajak daerah dan retribusi daerah terhadap variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi (*Rsquare*) (Ghozali, 2013: 124). Koefisien ini akan menunjukkan seberapa besar prosentase variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) adalah sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.991 <sup>a</sup>	.983	.983	83.642

a. Predictors: (Constant), Retribusi daerah, Pajak daerah,

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Data Sekunder Diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 6 di atas, hasil koefisien determinasi (*Rsquare*) sebesar 0,983 atau 98,3% yang menunjukkan kontribusi dari variabel pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Timur sangat besar. Sedangkan sisanya sebesar 1,7% (100% - 98,3% = 1,7%) dikontribusi oleh variabel lain yang tidak ada dalam model penelitian ini.

### Uji Kelayakan Model (Uji Statistik F)

Uji Statistik F digunakan untuk menguji kelayakan model regresi linier berganda dalam mengukur pengaruh variabel bebas pajak daerah dan retribusi daerah terhadap variabel terikat pendapatan asli daerah. Uji statistik F akan menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model cocok sebagai variabel penjelas variabel terikat. Kriteria model yang digunakan adalah sebagai berikut: a)  $P\text{-value} < 0,05$  menunjukkan bahwa uji model ini layak untuk digunakan pada penelitian. b)  $P\text{-value} > 0,05$  menunjukkan bahwa uji model ini tidak layak untuk digunakan pada penelitian. Hasil Uji Statistik F adalah sebagai berikut:

**Tabel 7**  
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji Statistik F)  
ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7452.625	3	3726.313	5328.626	.000 <sup>a</sup>
	Residual	130.769	187	699.301		
	Total	7583.395	189			

a. Predictors: (Constant), Retribusi daerah, Pajak daerah,

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Data Sekunder Diolah (2019)

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa angka  $F_{hitung}$  sebesar 5328.626 dengan sig. sebesar 0,000. Dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05, maka nilai sig. 0,000 lebih kecil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan variabel penjelas pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 8 menunjukkan model penelitian ini layak untuk dilakukan pengujian lebih lanjut.

### Hasil Pengujian Hipotesis (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05 (Ghozali, 2013: 138). Hasil Pengujian Hipotesis (Uji Statistik t) adalah sebagai berikut:

**Tabel 8**  
Hasil Pengujian Hipotesis (Uji Statistik t)  
Coefficients<sup>a</sup>

Model		$t_{hitung}$	Sig.	Hasil Uji Hipotesis
1	(Constant)	15,389	,000	
	Pajak Daerah	26,890	,000	Diterima
	Retribusi daerah	4,820	,000	Diterima

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Data Sekunder Diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 8 hasil Pengujian Hipotesis (Uji Statistik t) menunjukkan bahwa:

- 1) Dari hasil analisis regresi di atas, variabel pajak daerah diperoleh nilai  $t_{hitung}$  26.890 dengan signifikansi sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari nilai  $\alpha$  ( $0,000 < 0,05$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang berarti pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.
- 2) Dari hasil analisis regresi di atas, variabel retribusi daerah diperoleh nilai  $t_{hitung}$  4,820 dengan signifikansi sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari nilai  $\alpha$  ( $0,000 < 0,05$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima yang berarti retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

## **Pembahasan**

Uraian berikut ini tentang pembahasan tentang hasil analisis yang telah dikemukakan sebelumnya. Dari hasil perhitungan uji t diketahui bahwa masing-masing variabel mempunyai pengaruh berikut:

### **Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pajak daerah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2017. Sesuai dengan ketentuan pengambilan keputusan pada hipotesis maka  $H_1$  diterima yang berarti pajak daerah memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah secara parsial, sehingga semakin besar jumlah pajak daerah yang diterima maka akan semakin besar pula penerimaan pendapatan asli daerah pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa timur.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Rahayu (2015) dan Asteria (2015), yang membuktikan ada hubungan positif dan signifikan antara pajak daerah dengan pendapatan asli daerah, hal ini berarti dengan meningkatnya pajak daerah maka pendapatan asli daerah juga akan meningkat. Sedangkan menurut pendapat Mahmudi, (2015: 54), menjelaskan Pajak kabupaten/kota pada Provinsi yang ada di Jawa Timur meliputi; Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pajak Daerah merupakan penyumbang terbesar sumber PAD. Oleh karenanya, Manajemen perpajakan daerah harus mampu menciptakan sistem pemungutan yang ekonomis, efisien, dan efektif. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa penerimaan pajak lebih tinggi dari biaya pemungutan. Selain itu, pemerintah daerah perlu menjaga stabilitas penerimaan pajak tersebut.

Komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Semakin tinggi kemampuan daerah menghasilkan PAD, maka semakin besar pula penyelenggara pemerintah daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan. Kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Di samping itu, semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD (Rukmana, 2013).

### **Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa retribusi daerah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2017. Sesuai dengan ketentuan pengambilan keputusan pada hipotesis maka  $H_2$  diterima yang berarti retribusi daerah memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah secara parsial, sehingga besar kecilnya penerimaan retribusi daerah tentunya dapat mempengaruhi peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah pada Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa timur. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Rahayu (2015) menunjukkan bahwa secara parsial retribusi daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, karena retribusi daerah merupakan salah satu komponen PAD yang mempunyai peranan cukup besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah untuk merealisasi pendapatan asli daerah. Daerah mempunyai kewenangan dalam memungut semua jenis retribusi daerahnya. Semakin besar jumlah penerimaan retribusi daerah maka akan semakin besar pula jumlah penerimaan pendapatan asli daerah. Dengan demikian, adanya hubungan antara retribusi daerah dengan

pendapatan asli daerah yaitu jika jumlah penerimaan retribusi daerah mengalami kenaikan maka pendapatan asli daerah juga mengalami kenaikan.

Pada umumnya, retribusi daerah merupakan sumber pendapatan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) kedua setelah pajak daerah. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi yang dapat di sebut sebagai Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Jenis pos retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, sektor retribusi daerah merupakan sektor yang sangat penting untuk digali dan diperluas pengelolaannya, karena retribusi dipungut atas dasar balas jasa yang disediakan pemerintah. Pelaksanaan pemungutan retribusi daerah dilakukan diluar waktu yang ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan, selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa atas pungutan atas dasar persetujuan pemerintah pusat (Supardi, 2010: 55). Retribusi daerah menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber kekayaan asli daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber kekayaan asli daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya yang tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah (Rukmana, 2013).

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain itu pengujian dilakukan dengan model analisis regresi linier berganda untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, dengan menggunakan data Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Timur periode 2013-2017 yang tersedia di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Jawa Timur. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah: 1) Berdasarkan uji kelayakan model diketahui bahwa model pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan, sehingga layak digunakan dalam penelitian terhadap pendapatan asli daerah. 2) Pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2017, jadi dapat diartikan sehingga semakin besar jumlah pajak daerah yang diterima maka akan semakin besar pula penerimaan pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan komponen yang dominan terhadap pendapatan asli daerah, sehingga penerimaan pajak daerah harus terus ditingkatkan dengan cara optimalisasi pemungutan pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. 3) Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2017, jadi dapat diartikan sehingga besar kecilnya penerimaan retribusi daerah tentunya dapat mempengaruhi peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa retribusi daerah merupakan komponen yang penting dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

### **Keterbatasan**

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan dalam penelitian ini, maka terdapat keterbatasan penelitian ini, antara lain: 1) Peneliti yang dilakukan hanya menggunakan 2 variabel independen yaitu pajak daerah, retribusi daerah dalam mempengaruhi pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Timur. Diharapkan untuk penelitian

berikut untuk menambah variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah tidak diikutkan dalam penelitian ini misalnya luas wilayah, pertumbuhan ekonomi dan lainnya. 2) Periode penelitian ini terbatas untuk tahun 2013-2017. Peneliti lain yang tertarik dengan topik yang sama, diharapkan untuk mengambil periode terbaru sesuai tahun penelitian. 3) Peneliti selanjutnya disarankan memperluas lingkup wilayah penelitian di provinsi-provinsi lain.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut: 1) Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan badan-badan atau lembaga-lembaga tertentu karena profesionalismenya. Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah harus terus ditingkatkan dengan cara melakukan pengawasan secara ketat setiap pemungutan pajak maupun retribusi agar lebih efisien agar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik. 2) Bagi pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat mempertahankan serta berupaya lebih untuk meningkatkan penerimaan Pajak daerah dan retribusi daerah di Provinsi Jawa Timur memiliki pengaruh cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur dengan cara pengetatan sanksi dan memperbaiki sistem administrasi yang ada. 3) Pemerintah Daerah, melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sebaiknya mengadakan sosialisasi ke Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Timur tentang pentingnya pajak dan retribusi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Melalui sosialisasi ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar kewajiban pajak maupun retribusi daerahnya. Karena hasil dari komponen pendapatan asli daerah tersebut juga akan digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur daerah. Sehingga dengan semakin tinggi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi berarti masyarakat ikut berkontribusi dalam membangun daerahnya sertaberkontribusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan daerah tempat masyarakat tersebut berdomisili. 4) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) melakukan evaluasi hasil sosialisasi Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Timur, mana yang sudah efektif dan belum efektif. Kemudian meningkatkan program sosialisasi bagi Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Timur yang masih belum efektif dalam pemungutan pajaknya. Selain itu sebagai timbal baliknya meningkatkan sarana dan prasarana yang dimilikinya, sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak di Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Seperti Aparatur yang cekatan serta sistem komputerisasi yang mudah diakses serta handal dalam pelayanannya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Asteria. 2015. Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. *Jurnal Riset Manajemen*. 2 (1).
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Devas, Nick. 1989. *Keuangan Pemerintah daerah di Indonesia*. UI-Pres. Jakarta.
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Gita. 2008. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Bekasi. *Jurnal Akuntansi*. Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. 4(17): 567-588.
- Halim, 2013. *Analisis Investasi*. Edisi Pertama. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Hartono. 2017. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Cetakan Kedua. Yogyakarta Indonesia. BPF. Yogyakarta.

- Kusuma. 2011. Analisis Potensi Dan Kinerja Retribusi Pasar Kabupaten Wonogiri Tahun 2008-2013. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*. 11(3): 2-6.
- \_\_\_\_\_ dan Wirawati. 2011. Analisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pada sekabupaten/kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 5(3). 574-585.
- Lakoy, T. W., Engka, S. M. Desay, dan S. Y. L. Tumangkeng. 2016. Kontribusi Dan Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 16 (1): 559-567.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Kedua. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi. Yogyakarta.
- Nazir. 2013. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo. Jakarta.
- Putri, M. E. dan S. Rahayu. 2015. Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2010-2014). *e-Proceeding of Management*: 2 (1): 281-288.
- Rukmana. 2013. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. 3(2): 85-97.
- Sanusi, A. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Santoso. 2013. *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Sekaran, U. 2009. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi 4, Buku 1, Salemba Empat. Jakarta.
- Siahaan, N. H. T. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Erlangga. Jakarta.
- Suandy, E. 2008. *Hukum Pajak*. Edisi Kedua, Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Supramono dan Damayanti, T. W. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Supardi. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 3(5): 54:502-516.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
- Usman. 2017. Pengaruh Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal of Accounting and Finance (JAF)*. 1(2): 142-155.
- Wenny, C.D. 2013. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah STIE MDP*. 2(1): 39-51.